



Sidang Terdakwa Tim 9 Kasus Proyek Dermaga Gunaksa Bantah Masuk Tim, tapi Terima Honor



• NUSABALIYUDA

Sidang terdakwa Tim 9 Kasus Dermaga Gunaksa di Pengadilan Tipikor, Senin (11/5).

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung dengan terdakwa Tim 9 (mantan pejabat yang masuk panitia pengadaan lahan) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (11/5), dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dalam sidang kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam saksi dari Tim 11 (yang merupakan tim penafsir harga tanah) bentukan Pemkab Klungkung. Anehnya, bantah jadi tim penafsir harga, para saksi tetap terima honor.

Enam saksi dari Tim 11 yang dihadirkan ke Pengadilan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Seksa, 12 Mei 2015

Hal : 1



Bantah Masuk Tim, tapi Terima Honor

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Tipikor untuk diminta keterangannya, Senin kemarin, semuanya merupakan mantan pejabat Pemkab Klungkung. Mereka masing-masing I Komang Susana (mantan Kabag Umum Pemkab Klungkung), I Gede Putu Winastra (mantan Kabag Keuangan Pemkab Klungkung), I Nengah Becik (mantan Kabag Hukum Pemkab Klungkung), Nyoman Upadana (dari BPN Klungkung), I Gusti Komang Suradana (dari Dinas PU Klungkung), dan Dewa Nyoman Raka (juga mantan Kabag Umum Pemkab Klungkung).

Mereka dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada 6 terdakwa Tim 9 yang disidang terpisah di Pengadilan Tipikor, Senin kemarin. Keenam terdakwa yang dibagi dalam dua berkas terpisah itu masing-masing I Nyoman Rahayu (mantan Kadis DKP Klungkung selaku anggota Tim 9), AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung selaku anggota Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/anggota Tim 9), dan I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan Klungkung/anggota Tim 9), serta terdakwa Sementara I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil Sekretaris Tim 9).

Sedangkan tiga terdakwa lagi dari Tim 9, yakni I Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung yang bertindak se-

bagai Ketua Tim 9), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/sebagai Wakil Ketua Tim 9), dan I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/bertindak sebagai Wakil Ketua Tim 9) baru akan disidangkan di Pengadilan Tipikor dengan agenda sama, pemeriksaan saksis-aksi, Selasa (13/5) ini.

Dalam keterangannya di persidangan kemarin, enam saksi dari Tim 11 selaki penafsir harga lahan proyek Dermaga Gunaksa mengaku tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai tim penilai harga tanah. Mereka juga kompak mengatakan tidak pernah melakukan penafsiran harga tanah.

"Saya tidak pernah menerima SK sebagai Tim Penilai Harga Tanah. Saya baru tahu masuk sebagai panitia penilai setelah diperiksa jaksa tahun 2013 lalu," tutur saksi Komang Susana ketika ditanya majelis hakim pimpinan Cening Budiana dalam persidangan dengan terdakwa I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja, Senin kemarin.

Susana menjelaskannya, kehadirannya dalam sosialisasi dengan masyarakat Desa Gunaksa, 26 dan 29 November 2007, hanya sebagai undangan selaku pejabat Pemkab Klungkung, bukan sebagai tim penilai harga tanah. Paparan senada juga disampaikan saksi Putu Gede Winastra. Dia mengaku melakukan perhitungan harga tanah dalam sosialisasi 26 November 2007, setelah diminta Sekda Klungkung (waktu itu) Ketut Janapria.

"Waktu itu saya melakukan

perhitungan bukan sebagai tim penilai, karena saya tidak tahu masuk tim. Waktu itu, saya diminta menghitung oleh Sekda Janapria," jelas Winastra.

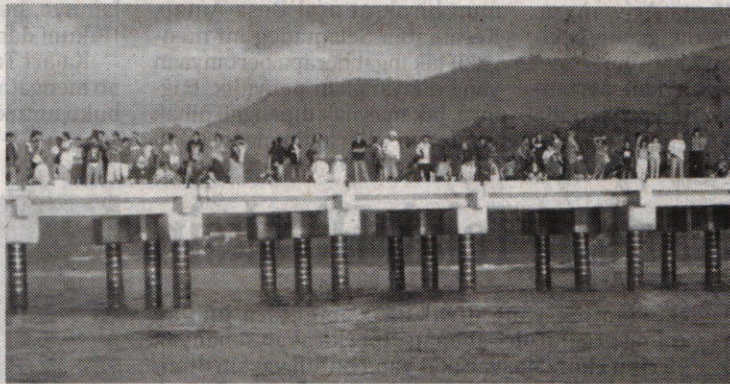
Dalam perhitungan tersebut, Winastra mengaku menggunakan patokan harga tanah saat pembebasan lahan untuk Jalan Bypass Prof Dr IB Mantra Rp 10 juta per are ditambah inflasi 7 persen per tahun. Hasilnya, tanah di lokasi Dermaga Gunaksa dihargai Rp 13,1 juta per are. "Tapi, waktu itu masyarakat minta harga Rp 15 juta per are, sehingga tidak terjadi kesepakatan dan pertemuan dilanjutkan 29 November 2007 sampai akhirnya disepakati harga Rp 14 juta per are," kenang mantan Kabag Keuangan Pemkab Klungkung ini.

Uniknya, meski semua saksi mengaku tidak pernah mengetahui SK sebagai Tim Penilai Harga Tanah, namun kuasa hukum kedua terdakwa yaitu Simon Nahak cs memiliki bukti kalau mereka sejatinya sudah mengetahui posisinya. Simon Nahak lalu menunjukkan bukti berupa penerimaan honor bagi keenam saksi sebagai Tim Penilai Harga Tanah. "Ini ada bukti penerimaan honor sebagai tim penafsir harga tanah," jelas Simon Nahak.

Ditohok seperti itu, lagi-lagi keenam saksi dari Tim 11 ini kompak mengelak dan mengatakan tidak pernah kedatangan serta menerima honor sebagai Tim Penilai Harga Tanah. "Saya tidak pernah kedatangan. Soal honor itu, saya lupa," ujar seluruh saksi saat dicecar majelis hakim. **rez**



Masih Optimis Dermaga Pesiar Tanah Ampo Berlanjut



• NUSABALI/NANTRA

KELANJUTAN dermaga pesiar, tetap jadi tanda tanya sejak tahun 2008.

AMLAPURA, NusaBali

Tarik ulur kelanjutan pembangunan Dermaga Pesiar Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem, terus bergulir. Kali ini turun dana dari pusat Rp 1,2 miliar untuk mereview seluruh kondisi dermaga yang telah terbangun, guna melanjutkan pembangunan itu tahap II. Namun tetap saja muncul pesimisme, bahwa proyek dermaga ini bakal berlanjut. Sebab, sebelumnya berulang kali disurvei menteri Perhubungan dan Komisi V DPR RI, tanpa hasil signifikan.

Meski demikian Kadis Perhubungan Karangasem I Wayan Sutapa bersama Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Adnyana optimis pembangunan berlanjut setelah audiensi di Kementerian Perhubungan. Demikian Sutapa dan IB Adnyana memaparkan di Amlapura, Senin

(11/5).

Sebelumnya, dermaga pesiar itu ditarget tuntas tahun 2008, tak kunjung selesai, karena belum berlanjut pembangunannya terutama di bagian perpanjangan dermaga 154 meter lagi, agar kapal-kapal besar bisa langsung nyandar. Sedangkan dermaga yang telah terbangun berbiaya Rp 70 miliar dari pusat, 154 meter.

"Kami kan telah audiensi bersama DPRD Karangasem di Kementerian Perhubungan, dan dapat bantuan Rp 1,2 miliar untuk menata kembali keberadaan dermaga. Tujuannya agar lebih memudahkan, melakukan pembangunan lanjutan. Kan Menteri Perhubungan juga telah melakukan survei langsung," kata Sutapa.

Setelah tuntas melakukan penataan kembali, katanya berlanjut

pembangunan tahap II memperpanjang dermaga tersebut. Di samping itu agar dermaga tetap bisa berfungsi untuk sementara, pusat juga telah menurunkan bantuan Rp 2,8 miliar untuk membangun jetty ramdor, telah tender. Sehingga kapal pesiar yang datang bisa menurunkan wisatawan, menggunakan sekoci dari kapal, selanjutnya sekoci merapat di jetty ramdor tersebut. "Jetty ramdor itu untuk kepentingan jangka pendek, sambil menunggu pembangunan tahap II," kata Sutapa.

IB Adnyana juga membenarkan, ada dua paket bantuan, penataan dermaga dan membangun jetty ramdor. "Kementerian Perhubungan telah menurunkan bantuan itu, kami ikut saat audiensi meyakinkan pusat," jelas IB Adnyana, politisi Partai Gerindra dari Banjar Gunung Biau, Desa Muncan, Kecamatan Selat.

Diduga banyak persoalan yang terjadi, sehingga kesulitan melanjutkan pembangunan dermaga pesiar, karena lokasi dermaga jadi satu areal dengan Kuburan Desa Pakraman Tanah Ampo. Sehingga kendala yang terjadi, cenderung disebabkan non teknis. Kelian Desa Pakraman Tanah Ampo I Gede Suyadnya, enggan mengomentari masalah itu. Walau di sisi lain mengakui lokasi dermaga terbilang keramat, sering ada warga yang hilang, dan pengunjung yang gemar memancing, sering diganggu makhluk gaib. **k16**

Edisi : Selasa, 12 Mei 2015

Hal : 8



Rencana Pelimpahan Pasar Sangsit ✓ Dewan Sinyalkan Dukung Tawaran Sharing Bagi Hasil Tim Pemkab



• NUSABALI/SUDIRTA
KETUA Komisi III DPRD Buleleng,
Ni Made Putri Nareni

SINGARAJA, NusaBali

Sikap lembaga DPRD Buleleng dalam sharing bagi hasil dari rencana pelimpahan pengelolaan Pasar Sangsit, di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan kepada Pakraman Desa Sangsit Dauh Yeh, mengarah pada sikap tim Pemkab Buleleng. Dimana dewan pun inginkan sharing bagi hasil itu 30 persen berbanding 70 persen dari pendapatan bersih.

Sikap itu diutarakan Ketua Komisi III DPRD Buleleng Ni Made Putri Nareni yang dikonfirmasi Minggu (10/5). Dikatakan, sharing bagi hasil 30 persen berbanding 70 persen itu merupakan aturan

main dalam sistem akuntansi. Disamping itu, sharing bagi hasil itu sudah berjalan sesuai regulasi yang ada dalam pengelolaan pasar. "Ini kan sudah berjalan sesuai aturan. Dan ini sudah baku. Ya ini harus diikuti (pihak desa) sebagai konsekuensi," kata Nareni.

Srikandi Partai Nasdem ini juga menyebut, dirinya selaku ketua Komisi III sangat mendukung langkah bupati yang memberikan hak pengelolaan pasar Sangsit kepada pihak adat. Hanya saja, Nareni juga minta agar pihak adat bisa menyadari keinginan pemerintah. "Saya sepakat dengan pak bupati yang sudah mendengar keinginan masyarakat (dengan pelimpahan pengelolaan pasar Sangsit), tapi masyarakat juga harus memahami bahwa Sharing bagi hasil itu harus mengacu pada regulasi yang sudah baku. Janganlah melebihi keinginan semula," ujarnya.

Menurut Nareni, dirinya akan menemui tim ekonomi Desa Sangsit. Sehingga, pengelolaan pasar Sangsit bisa secepatnya dikelola oleh pihak adat. "Saya berencana temui para tokohnya, untuk kembali kepada niat awal mengelola dengan sharing yang sudah dikaji oleh Pemkab. Kalau ini bisa disetujui, kan bisa secepatnya beralih," ujarnya. **k19**

Edisi : selasa, 12 Mei 2015

Hal : 12



Pendalaman Kasus Dugaan Pemerasan di DKP Tabanan

Sekkab Wirna Dipanggil Penyidik

Dua penyidik mencecar 21 pertanyaan kepada Wirna Ariwangsa yang berlangsung selama tiga jam lebih. Sekkab Tabanan ini mengaku siap dipanggil lagi andaikata keterangannya masih dibutuhkan pihak Kejari Tabanan.

TABANAN, NusaBali

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tabanan, Nyoman Wirna Ariwangsa dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan, Senin (11/5). Wirna dicecar sejumlah pertanyaan seputar kasus dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan yang terjadi di

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan. Dalam kasus itu, Kejari Tabanan menetapkan dua tersangka yakni I Gede Jg, saat itu sebagai Kabid Angkutan dan Transportasi DKP dan CD selaku Kasubag Kepegawaian DKP.

Kasi Pidsus Kejari Tabanan, Fathur Rohman, membenarkan memanggil Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa untuk dijadikan saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan di DKP. Wirna Ariwangsa tiba di kantor Ke-

jari Tabanan sekitar pukul 13.30 Wita. Dua penyidik yang ditugaskan menanyai Wirna Ariwangsa masing-masing Made Rai Joni Ariha dan Alivin Nurahman. Wirna baru keluar dari ruangan penyidik sekitar pukul 16.15 Wita. "Ada 21 pertanyaan kepada pak Sekkab Wirna Ariwangsa. Pemeriksaan berlangsung sekitar 3 jam," terang Fathur.

Fathur menerangkan, pertanyaan yang dilyangkan kepada Sekkab Tabanan seputar dugaan

pemerasan dan percobaan pemerasan yang terjadi di DKP Tabanan. Dalam kasus ini, Kejari telah menetapkan dua tersangka yakni I Gede Jg dan CD. Tak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka baru, jika ada bukti baru yang ditemukan. Jaksa asal Bojonegoro, Jawa Timur ini menolak membeberkan materi pertanyaan yang dilyangkan kepada Sekkab Wirna Ariwangsa. Apakah seputar aliran dana dari dugaan pemerasan yang terjadi di DKP atau lainnya? "Pertanyaannya ya seputar dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan di DKP," kelit Fathur.

Terpisah, Sekkab Wirna Ariwangsa dihubungi per telepon membenarkan dipanggil pihak Kejari Tabanan terkait dugaan pemerasan di DKP Tabanan. Namun birokrat asal Desa Antap, Kecamatan Selemadeg ini mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilyangkan penyidik. Baginya, tak masalah dipanggil pihak kejaksaan yang ingin mengetahui

tersangka. Atang mengatakan, penanganan perkara dugaan pemerasan di DKP Tabanan diawali dengan membentuk tim sejak 10 Maret 2015. Tim itulah yang kemudian bekerja keras mengumpulkan alat bukti mu-

seputar tugas-tugasnya. Sebab menurut mantan Dinas Perikanan dan Kelautan Tabanan ini, sebagai Sekkab ia harus koordinasi vertikal dan horisontal. Pihaknya mengaku siap memenuhi panggilan kejaksaan andai keterangannya masih dibutuhkan. "Tadi dimintai keterangan seputar kasus yang terjadi di DKP. Saya berikan keterangan secara umum dan normatif," tandas Wirna Ariwangsa.

Sebelumnya, Kejari Tabanan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar atau pemerasan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan. Kedua tersangka itu berinisial I Gede Jg, mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP yang dimutasi jadi Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker Tabanan. Tersangka lainnya, berinisial CD, Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP.

Kajari Tabanan, Atang Bawono mengatakan, sudah cukup alat bukti untuk meningkatkan status Jg dan CD dari saksi menjadi

lai dari petunjuk, surat, hingga keterangan saksi. "Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang ada, keduanya kita naikkan statusnya menjadi tersangka," tegas Atang, Senin (4/5).

Atang menyebutkan, tak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini, mengingat pihaknya terus mengembangkan penyidikan. Penambahan tersangka bisa terjadi jika ada alat bukti baru yang didapatkan penyidik. Dikatakan, dalam mengungkap dugaan pungutan liar di DKP Tabanan, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi baik dari staf DKP, staf instansi lain dan orang umum. "Tak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka," tandas Atang. k21

Edisi : Seksa, 12 Mei 2015

Hal : 7